

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media massa mempunyai peran strategis yakni sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada khalayak atau public secara bersamaan jika khalayak tersebut juga mengakses atau menggunakan media tersebut. Pada umumnya media mempunyai guna yakni penghantar dalam bermacam ragam pengetahuan, menyelenggarakan aktivitas dalam lingkungan publik yang bisa dijangkau oleh public secara leluasa, sukarela, universal, serta murah, hubungan antara penerima serta pengirim seimbang dan sama serta mampu menjangkau lebih banyak orang daripada institusi yang lain. (McQuail,1987:51).

Media massa yang benar seharusnya bisa menjalankan fungsinya seperti yang dikemukakan oleh Harold Laswell diantaranya yakni untuk menginformasikan (*to inform*), untuk mendidik (*to educate*) dan untuk menghibur (*to entertain*). Merujuk pada Undang-Undang no.40 mengenai pers bahwa fungsi pers yakni untuk menginformasikan, mendidik, menghibur dan melakukan pengawasan sosial (sosial control) baik pada perilaku publik maupun pada penguasa. Komunikasi politik yang ada pada media massa erat kaitannya dengan opini publik. Oleh karenanya media massa menjadi saluran yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi politik. Media massa tidak hanya sekedar sarana menampilkan sesuatu hal kepada public dengan apa adanya, tetapi tergantung pada kelompok yang mendominasi.

Komunikasi politik yang ada pada media massa erat kaitannya dengan opini public. Seperti kita ketahui bahwa opini public merupakan upaya untuk membangunkan sikap dan tindakan khalayak mengenai suatu masalah politik atau aktor politik (Nimmo, 1989, p. 5). Oleh karenanya media massa menjadi saluran yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi politik. Media massa tidak hanya sarana menampilkan sesuatu hal kepada publik dengan apa adanya, akan tetapi tergantung pada kelompok yang mendominasi.

Salah satu berita sedang ramai diperbincangkan beberapa tahun terakhir ini yakni berita terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia

yang digagas pemerintah Joko Widodo. Bahkan dalam salah satu cuplikan berita Presiden Jokowi mengatakan bahwa “pemerintah sudah membahas rencana ini sejak 3 tahun terakhir” (*Republika.co.id* edisi 6 Mei 2019, 5 Januari 2020 pukul 20.00). Sebelumnya melalui rapat terbatasnya pemerintah pada tanggal 29 April 2019 Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan agar memindahkan ibukota negara keluar pulau Jawa.

Terkait dengan rencananya dalam memindahkan ibu kota tersebut, sebenarnya hal ini sudah ada sejak lama, bahkan pernah diumumkan sejak era Presiden Soekarno dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Situasi menjadi tak menentu menjelang agresi militer Belanda yang menyebabkan ibukota harus segera diselamatkan. Baru setelah dirasa cukup aman, ibu kota kembali ke Jakarta. Pada masa selanjutnya Soekarno ternyata memiliki pemikiran untuk memindahkan ibu kota kembali. Namun kali ini pertimbangan dari Presiden Soekarno bukan segi faktor keselamatan dan keamanan, melainkan dengan menunjuk kota-kota lain yang patut dimanfaatkan untuk menjadi ibu kota negara. Namun, belum ada kelanjutannya terkait prosesi pemindahan dan hingga saat ini Jakarta masih menjadi lokasi ibu kota negara dan belum bisa tergantikan.

Rencana terkait pemindahan ibukota negara yang dilakukan oleh Pemerintahan di era Presiden Jokowi saat ini melihat kepada Amerika Serikat yang menunjuk Washington DC sebagai ibu kota yang baru, sebelumnya ibu kota Amerika Serikat yakni New York yang saat ini menjadi pusat bisnis terkemuka di dunia. Rencana pemindahan ibu kota Indonesia hanya memindahkan pusat pemerintahannya saja sehingga Jakarta akan tetap menjadi pusat keuangan dan bisnis, seperti layaknya New York di Amerika Serikat. Contoh lain negara yang berhasil memindahkan ibukotanya yakni Malaysia yang telah memindahkan ibukotanya dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Selanjutnya yakni Australia yang memindahkan ibu kota dari Sydney ke Canberra.

Keseriusan pemerintah menjalankan rencananya untuk memindahkan ibu kota di tengah-tengah banyaknya isu yang sedang bergejolak belakangan ini menarik peneliti untuk melihat seperti apa berita yang dibingkai oleh kedua media. Tak hanya itu, beberapa warganet sudah menaruh curiga terkait pemindahan ibukota

ini hanyalah pengalihan isu semata. Meskipun Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa keputusan pemindahan ibukota ini sudah di rencanakan sejak 3 tahun terakhir.

Peneliti memilih dua media online yang akan diteliti yaitu *republika.co.id* dan *tempo.co*. pemilihan media *Republika.co* sendiri untuk dijadikan obyek penelitian karena visinya yang menyuarakan suara umat, bukan suara rakyat disamping itu pula terdapat Erick Tohir di balik media *republika*. Erick Tohir memiliki prioritas saham ABBA melalui PT.Beyond Media, mengutip laporan ABBA per Desember 2017 porsinya sebesar 45,76 persen. Sedangkan pada *tempo.co* sendiri dikarenakan portal media ini kontra dengan setiap argument yang disampaikan pemerintah. Berdasarkan perbedaan ideology dan factor kepemilikan media, objektivitas, netralitas dan imparialitas keduanya memiliki kecendrungan yang berbeda. Se jauh mana ideology mereka mempengaruhi isi berita yang berkaitan dengan pemerintahan ini.

1.2 Rumusan Masalah

Jurnalisme merupakan tindakan komunikasi dan merupakan ilmu pengetahuan yang multidisplin dan aspek kajiannya selalu berkaitan dengan disiplin ilmu, politik merupakan salah diantaranya. Kebebasan pers ditandai dengan adanya Undang-Undang No.40 tahun 1999 mengenai pers. Pada saat itu berbagai nama media massa bermuculan di masyarakat dan seiring berjalannya waktu maraknya penggunaan internet dilingkungan masyarakat, maka lahirlah apa yang disebut jurnalisme online .

Dalam penelitian framing ini berita yang dilakukan oleh kedua media massa memunculkan pertanyaan: Bagaiamakah framing terkait wacana pemindahan ibukota yang di beritakan oleh media *Republik.co.id* dan *Tempo.co* pada bulan Agustus 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Agar mendapatkan gambaran bagaimana framing yang dilakukan oleh media dalam menyampaikan sebuah pesan dan peristiwa, dalam hal ini terkait dengan pemindahan ibukota.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat akademis dari penelitian adalah sebagai sumber pengetahuan mengenai pembungkaman terhadap isu pemindahan ibu kota negara keluar jawa
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana pembungkaman berita yang dilakukan oleh media dalam memberitakan sebuah peristiwa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan pada media dalam menjaga objektivitas pemberitaan dan posisi netral dalam menyampaikan sebuah berita.
3. Manfaat sosial penelitian ini untuk menunjukkan kepada public mengenai konstruksi realitas sosial yang dilakukan oleh media massa, agar public tidak begitu saja dalam mengkonsumsi berita tetapi juga memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah berita serta memberikan penilaian kritis terkait berita yang disampaikan oleh media. (Santana, Jurnalisme Kontemporer, 2017)